

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

- Fadillah, N. A. N., Kusumadewi, R., & Suparman, N. (2022). Digital Government dalam Pelayanan Kependudukan melalui Aplikasi Sakedap di Kabupaten Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4067-4082.
- Malik, S. S., Achmad, M., & Sutiyo, S. (2023). PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM PELAYANAN DARING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SUBANG (SIPEDAS) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 10(2), 704-717.
- NURYANTI, Y. (2021). *PERAN PEMUDA DALAM PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK) DAN IMPLIKASINYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KINERJA LEMBAGA (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rahayu, R. F., & Ibrahim, I. (2023). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Inovasi*, 3(1).
- Rochman, A. (2019). *IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MALANG (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Safitri, A. A. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Siloka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314-324.
- Shkarlet, S., Oliychenko, I., Dubyna, M., Ditkovska, M., & Zhovtok, V. (2020). Comparative analysis of best practices in e-Government implementation and use of this experience by developing countries. *Administratie si Management Public*, (34), 118-136.
- Shkarlet, S., Oliychenko, I., Dubyna, M., Ditkovska, M., & Zhovtok, V. (2020). Comparative analysis of best practices in e-Government implementation and use of this experience by developing countries. *Administratie si Management Public*, (34), 118-136.

Sirnan, S., & Erwati, H. (2021). Penerapan Electronic Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Dimasa Pandemic Covid 19. *YUME: Journal of Management*, 4(3), 615-621.

Buku

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2012). Dasar-dasar dan teori administrasi publik. Hoboken, NJ: Jakarta: Bumi Akasara.

Pasolong, Harbani. (2008). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.

Yeremias T. Keban. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan ISU / Yeremias T. Keban.

Yusuf, A. M. (2014). Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.

Zuhal. (2013). Gelombang ekonomi inovasi: kesiapan Indonesia berselancar di era ekonomi baru. Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Berita online dan website

Open Data Jabar. (2022, 7 Juni). Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. [Jumlah Penduduk yang Belum Memiliki Kartu Identitas Anak \(KIA\) berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat](#). Diakses pada Selasa 12 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

Open Data Jabar. (2022, 7 Juni). Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. [Jumlah Penduduk yang Memiliki Kartu Identitas Anak \(KIA\) berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat](#). Diakses pada Selasa 12 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB

Pos Kota. (2023, 14 Januari). 1,2 Juta Anak di Kabupaten Bogor Belum Memiliki KIA. [1,2 Juta Anak di Kabupaten Bogor Belum Miliki KIA - poskota.co.id](https://poskota.co.id/1,2-Juta-Anak-di-Kabupaten-Bogor-Belum-Miliki-KIA/). Diakses pada Sabtu 16 Maret 2024 Pukul 19.00 WIB